

Pemikiran Politik Islam pada Masa Kolonialisme dan Pasca Kolonialisme

Putri Lestari Kusuma

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Pausi Rahman

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Arval

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Marzuki

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

Korespondensi penulis: putri0403231043@gmail.com

Abstract. *This paper explores the dynamics of Islamic political thought during the colonial and post-colonial periods through the contributions of three prominent figures: Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, and Rashid Rida. These three pioneers of Islamic reform responded to the decline of the Muslim world and the dominance of Western imperialism by offering ideological, political, and social solutions. Al-Afghani emphasized the importance of Muslim unity through the idea of pan-Islamism and revolutionary resistance against despotic rule and foreign colonization. Muhammad Abduh advocated for the reform of Islamic thought through rational interpretation, rejection of blind imitation (taqlid), and the application of democratic principles and social justice. Rashid Rida, with a more systematic approach, developed the concept of the caliphate as the ideal political institution in Islam and stressed the importance of reforming the governance system based on the principles of Sharia and tawhid. Their ideas laid a crucial foundation for the development of modern Islamic political discourse and offered direction for the Muslim struggle to establish a just, independent socio-political order aligned with Islamic values in the post-colonial era.*

Keywords: *Islamic Politics, Colonialism, Caliphate*

Abstrak. Tulisan ini membahas dinamika pemikiran politik Islam pada masa kolonialisme dan pasca-kolonialisme melalui kontribusi tiga tokoh utama: Sayyid

Received Juli, 2025; Revised Juli, 2025; September, 2025

*Corresponding author, putri0403231043@gmail.com

Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Ketiganya merupakan pionir pembaruan Islam yang merespons kemunduran umat Islam dan dominasi imperialisme Barat dengan tawaran solusi yang bersifat ideologis, politis, dan sosial. Al-Afghani menekankan pentingnya persatuan umat Islam melalui gagasan pan-Islamisme dan perlawanan revolusioner terhadap kekuasaan despotik serta penjajahan asing. Muhammad Abduh mendorong reformasi pemikiran Islam melalui rasionalisasi ajaran, penolakan terhadap taqlid, serta penerapan prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Rasyid Ridha, dengan pendekatan yang lebih sistematis, mengembangkan gagasan tentang khilafah sebagai institusi politik ideal dalam Islam dan pentingnya pembaruan sistem pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tauhid. Pemikiran ketiganya menjadi fondasi penting bagi perkembangan wacana politik Islam modern, sekaligus memberikan arah bagi perjuangan umat Islam dalam membangun tatanan sosial-politik yang adil, merdeka, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam di era pasca-kolonial.

Kata Kunci: Politik Islam, Kolonialisme, Khilafah

LATAR BELAKANG

Dinamika politik dunia Muslim modern tidak dapat dilepaskan dari perdebatan panjang mengenai konsep negara Islam, pembaruan pemikiran politik, dan respon umat Islam terhadap arus modernitas dan kolonialisme. Berbagai negara Muslim menunjukkan corak penerapan Islam yang beragam dalam struktur kenegaraan mereka, mulai dari yang berbasis formalisasi syariat hingga penerapan nilai-nilai Islam secara substantif dalam sistem demokrasi modern. Perkembangan ini menjadi cerminan pergulatan umat Islam dalam menyesuaikan ajaran agamanya dengan realitas sosial-politik kontemporer.

Seiring dengan itu, muncul berbagai tokoh pembaru yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan wacana politik Islam modern. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha, yang dikenal sebagai pelopor gerakan pembaruan Islam (islah) dan kebangkitan politik umat Islam. Ketiganya tidak hanya menawarkan gagasan politik yang progresif, tetapi juga menjadi motor penggerak kesadaran umat Islam untuk keluar dari keterpurukan akibat penjajahan dan stagnasi internal.

Pemikiran mereka lahir dari realitas kemunduran umat Islam yang dibarengi dengan dominasi Barat, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan. Gagasan Al-Afghani tentang Pan Islamisme, seruan Muhammad Abduh akan pentingnya ijtihad dan rasionalitas, serta konsep khilafah dan kepemimpinan umat menurut Rasyid Ridha menjadi tonggak penting dalam peta intelektual dan politik dunia Islam modern. Di sisi lain, perjalanan sejarah politik negara-negara Muslim seperti Turki, Mesir, Saudi Arabia, Iran, Irak, India, dan Indonesia menunjukkan berbagai model penerapan nilai-nilai Islam dalam struktur kenegaraan yang terus berkembang hingga saat ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep negara Islam modern di dunia Muslim, serta menelaah kontribusi pemikiran

politik Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha dalam konteks kebangkitan politik umat Islam dan pembentukan negara modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan konsep negara Islam modern serta pemikiran politik tokoh-tokoh pembaru Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Data yang digunakan bersumber dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen sejarah yang memuat pemikiran dan kontribusi ketiga tokoh tersebut dalam bidang politik dan kebangkitan umat Islam. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kritis untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai peran pemikiran mereka dalam merespons tantangan modernitas, kolonialisme, dan dinamika politik umat Islam di berbagai negara. Melalui metode ini, peneliti berupaya menyajikan kajian yang objektif, sistematis, dan sesuai dengan prinsip ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Islam dan Gerakan Anti-Kolonial

Sejarah kolonialisme mencatat penderitaan panjang bangsa-bangsa yang dijajah oleh kekuatan asing. Di tengah penindasan dan eksploitasi yang berlangsung selama ratusan tahun, muncul berbagai bentuk perlawanan rakyat yang dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal. Dalam konteks dunia Islam, agama Islam tidak hanya menjadi sumber spiritualitas, tetapi juga menjadi kekuatan ideologis yang mendorong semangat perlawanan terhadap kolonialisme. Perpaduan antara keimanan dan nasionalisme menjadikan Islam sebagai unsur penting dalam dinamika gerakan anti-kolonial di berbagai wilayah Muslim.

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya menegakkan keadilan dan membela yang lemah sering dikutip oleh para pejuang sebagai motivasi perjuangan. Selain itu, sejarah Islam sendiri menyimpan berbagai kisah perjuangan melawan ketidakadilan, mulai dari Rasulullah SAW yang menentang kekuasaan Quraisy yang zalim, hingga ekspansi dakwah Islam yang menekankan pembebasan dari penindasan struktural.

Di berbagai wilayah Muslim, ulama dan pemimpin agama sering menjadi garda terdepan dalam perjuangan anti-kolonial. Mereka tidak hanya memberikan fatwa-fatwa yang menghalalkan perlawanan terhadap penjajah, tetapi juga secara langsung memimpin gerakan perlawanan bersenjata. Beberapa gerakan anti kolonial yang menonjol antara lain:

1. Perang Diponegoro (1825–1830)

Dukungan besar dari kalangan petani dan golongan masyarakat bawah yang tertindas akan kepuasan pihak pemerintah Hindia Belanda yang hampir menguasai keraton Yogyakarta, serta dukungan penuh dari komunitas Islam di Jawa baik dari kalangan santri maupun kiai dan ulama. Karena itu semangat juang yang bernafas penemuan peradilan dan kebebasan memupuk dan menjadi perang terhadap keangkuhan bangsa kolonial Hindia Belanda. Dari kalangan ini Pangeran Diponegoro dapat memobilisasi kekuatan pasukannya dalam melawan musuh, juga dapat mengatur strategi dan taktik perang yang kerap kali berubah-ubah sehingga membuat pihak Hindia Belanda kewalahan dalam menghadapi Pangeran Diponegoro beserta pasukannya. Kendati demikian, dukungan dari golongan bangsawan juga turut serta, karena sebagian dari golongan bangsawan masih menjalin keakraban dan mulai sadar akan resah dengan hadirnya bangsa kolonial dalam masalah internal kesultanan Yogyakarta. Perlawanan yang dilancarkan oleh Pangeran Diponegoro beserta pasukannya pada hakikatnya untuk menentang akses yang ditimbulkan oleh terjadinya perubahan-perubahan secara struktural dan kultural yang dibawah dari bangsa kolonial Barat sehingga menyebabkan kemerosotan moral, baik di kalangan keraton dan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, inti dari perlawanan ini memiliki sebuah makna, yaitu menggelakkan budaya asing dalam hal ini budaya barat dan melestarikan budaya leluhur dalam hal ini budaya dan tradisi Jawa sebagai nilai yang diyakini bisa menciptakan kehidupan yang harmonis. Pangeran Diponegoro juga memandang bahwa perang ini untuk menegakkan keadilan di atas kebatilan seperti yang telah diajarkan oleh Islam (Soedjono, 2010).

Selain dari komunitas Islam, kekuatan Pangeran Diponegoro diperoleh dari dukungan dari lintas daerah dengan kekuatan yang berbeda-beda, seperti dari daerah Madiun, Pajang, Bagelen, dan Mataram. Di samping itu, Pangeran Diponegoro mendapatkan pertolongan dari kerabat terdekat dan golongan bangsawan keraton, seperti Pangeran Suryodiningrat, Pangeran Adisuryo, Pangeran Joyowinoto, dan Bupati Mangunnegoro. Pangeran Diponegoro juga memiliki panglima yang cukup kuat, antara lain Pangeran Mangkubumi, Pangeran Ngabehi Joyokusuma, Sentot Alibasa, dan Abdul Mustafa Prawirodirjo (Rohim, 2017).

2. India: Gerakan Khilafat (1919–1924)

Gerakan Khilafat di India pada tahun 1919-1924 lahir dilatarbelakangi dengan adanya kondisi kolonialisasi Inggris di dalam India dan di luar India, khususnya menyangkut keberadaan Islam. Kolonialisasi tersebut berakibat pada penindasan terhadap komunitas kaum muslimin. Di dalam India, terjadi beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah Inggris yang tidak mengenakan bagi kaum muslimin India. Peristiwa seperti Pembagian Bangla 1911, Tragedi Kanpur 1913, Pakta Lucknow 1916, dan Tragedi Amritsar 1919 telah merugikan dan membawa penderitaan bagi kaum muslimin India, maka dari sinilah timbul perasaan tidak suka terhadap pemerintahan Inggris di India. Di luar India, kolonialisasi Inggris dan Sekutu mengusik keberadaan kekhalifahan Turki Utsmani dan tanah-tanah suci Islam. Peristiwa seperti Perang

Tripolitania dan Perang Balkan tahun 1911-1913, serta Perang Dunia pertama tahun 1914-1918 bagi kaum muslimin India, Inggris telah menghina dan menyakiti kaum muslimin India. Inggris telah melakukan tindakan mengusik pemimpin tertinggi keagamaan mereka, yaitu Khalifah Turki Utsmani. Kedua kondisi ini, didukung dengan arus Pan Islamisme yang masuk ke India pada abad kesembilanbelas yang dibawa oleh Jamaluddin al-Afghani.

Kolonialisme Inggris yang menggenggam kaum muslimin India dan kekhalifahan Turki Utsmani, serta arus Pan Islamisme adalah yang menjadi faktor berdirinya Gerakan Khilafat. Faktor-faktor tersebut adalah saling berkaitan dan berhubungan sehingga memunculkan Gerakan Khilafat. Gerakan Khilafat di India dicetuskan oleh beberapa tokoh kaum muslimin India, yaitu seperti Maulana Abdul Bari, Maulana Muhammad Ali, Dan Maulana Shaukat Ali. proses berjalannya Gerakan Khilafat di India tahun 1919-1924 berjalan secara dinamis. Gerakan Khilafat mampu menyatukan ketiga aliran teologi, seperti Sunni, Syi'i, dan Ahmadiyah di India, yang sebenarnya terdapat perbedaan yang besar di antara ketiganya. Kesatuan kaum muslimin India adalah hasil positif yang diraih Gerakan Khilafat. Keberhasilan Gerakan Khilafat juga mampu bekerjasama dengan Kongres Nasional India, yang mayoritas diisi oleh golongan Hindu. Walaupun tidak bertahan lama, tetapi paling tidak dengan terciptanya kerjasama tersebut Gerakan Khilafat atas nama kaum muslimin India dapat mewujudkan identitasnya sebagai golongan yang berwawasan dan berintelektual, bukan sebagai golongan yang terbelakang dan pasif terhadap kepentingannya sendiri. Gerakan Khilafat mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap kepentingan kaum muslimin dunia, yaitu dengan partisipasinya di beberapa konferensi Islam sedunia, dan pendudukan serta pengiriman bantuan terhadap kekhalifahan Turki Utsmani (Karim, 2003). Walaupun beberapa kebijakannya mengalami kegagalan, seperti Gerakan Hijrah dan Gerakan Non-Kooperasi, tidak memupuskan Gerakan Khilafat untuk berevaluasi dan memperbaiki. Hasil yang positif dari Gerakan Khilafat adalah sebagai berikut: yang pertama, terciptanya kesatuan kaum muslimin India dalam menunjukan eksistensi jati dirinya, baik di India maupun dunia internasional. Bentuk kepedulian masalah seputar keberadaan kekhalifahan Turki Utsmani sebagai bentuk persatuan kaum muslimin (Pan Islamisme). Kedua Gerakan Khilafat mampu menjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan golongan Hindu walaupun hanya berlaku untuk sementara waktu.

Gerakan Khilafat mampu menyatukan ketiga aliran teologi Islam karena sebagai berikut: pertama, adanya kesamaan kenyataan mengalami kolonisasi Inggris. Kedua, adanya arus modernisme Islam yang digaungkan oleh para tokoh kaum muslimin India ataupun tokoh Non-India yang sempat tinggal di India, misalnya Jamaluddin al-Afghani. Arus modernisme Islam mampu mengikis setiap perbedaan doktrinal kepercayaan, sehingga arah kesatuan kaum muslimin terbentuk. Kesatuan ini berpusat pada perhatian akan kepentingan kaum muslimin India. Jadi kesimpulannya adalah adanya faktor kesamaan merasakan kolonialisme Inggris dan adanya arus modernisme Islam (Pan Islamisme). Keduanya berujung pada kebangkitan kaum muslimin India akan eksistensi identitasnya dan kepentingan-kepentingannya. Gerakan Khilafat mampu bekerjasama

dengan Kongres Nasional India dalam Gerakan Non-Kooperasi karena adanya faktor-faktor kepentingan. Gerakan Khilafat menggunakan Kongres Nasional India dan program Gerakan Non-Kooperasi sebagai alat penekan/alat gertakan kebijakan Inggris menyangkut kekhalifahan Turki Utsmani dan beberapa tanah suci Islam, serta sebagai langkah mengatur masa depan kaum muslimin India di India, apabila India menjadi pemerintahan sendiri. Kongres Nasional India menggunakan Gerakan Khilafat sebagai alat kampanye pemerintahan sendiri, yang pada intinya sebagai bukti terbentuknya Nasionalisme India. Karena kepentingan-kepentingan masing-masing kelompok tidak terpenuhi secara maksimal, maka berakhirlah kerjasama tersebut.

Ketiga, Gerakan Khilafat mengalami kegagalan karena adanya beberapa penyebab, yaitu sebagai berikut: pertama, Gerakan Khilafat dalam bekerjasama dengan Kongres Nasional India dalam Gerakan Non-Kooperasi mengalami kegagalan setelah terjadi Pemberontakan Mapilla dan Tragedi Chauri Chaura pada tahun 1922-1923 M, sehingga Gerakan Khilafat kehilangan kekuatan untuk menekan kebijakan Inggris menyangkut kekhalifahan Turki Utsmani. Ditambah Gerakan Khilafat sendiri disibukan dengan konflik Islam-Hindu di India. Kedua, penghapusan institusi kekhalifahan Turki Utsmani oleh pemerintahan negara Turki pada tahun 1924 M. Penghapusan kekhalifahan merupakan dampak dari arus sekularisasi yang dijalankan oleh Mustapha Kemal, sehingga Gerakan Khilafat kehilangan alasan berdirinya gerakan. Terakhir, karena isu khilafah tidak terangkat di dalam Konferensi Islam Sedunia pada tahun 1926 di Mekkah dan tahun 1931 di Jerussalem. Kegagalan tersebut karena konferensi membawa isu Pan Islamisme bukan ranah kekhalifahan tetapi ke ranah kerjasama untuk kemajuan bersama, dan disamping itu, konferensi memperhatikan permasalahan bangsa Yahudi yang menduduki Palestina. Alasan-alasan tersebut membawa kepada kegagalan perjuangan Gerakan Khilafat untuk menegakkan kekhalifahan.

B. Pemikiran Politik Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha

1. Jamaluddin Al-Afghani

Sayyid Jamaluddin al-Afghani adalah salah seorang tokoh penting penggerak pembaharuan dan kebangkitan Islam abad ke-19. Ia disenangi sekaligus dimusuhi oleh Dunia Islam sendiri. Disukai karena aktivitas dan gagasan politiknya menjadi inspirasi bagi upaya pembebasan umat Islam dari penjajahan bangsa-bangsa Barat. Sebaliknya, Ia dimusuhi karena menjadi batu sandungan bagi penguasa-penguasa Dunia Islam yang otoriter, korup, dan despotis ketika itu. Jamaluddin dianggap membahayakan kekuasaan mereka (Iqbal, 2010).

Jamaluddin dilahirkan pada tahun 1838 M. Ayahnya bernama Sayyid Syafdar, seorang penganut mazhab Hanafi. Menurut sejarah bahwa Jamaluddin adalah keturunan Rasulullah, silsilah keluarganya sampai kepada Nabi SAW. melalui Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib, suami Fathimah putri beliau. Sebagian orang mengklaim bahwa Ia adalah orang Iran, namun ia menyembunyikan kesyah annya (taqiyah) ditengah-tengah penguasa dan masyarakat muslim yang mayoritas menganut Sunni. Sebagian yang lain menyatakan bahwa Ia adalah orang Afghanistan, sebagaimana yang tercantum dibelakang namanya.

Munculnya suatu gagasan pemikiran yang dianggap baru dan orisinal dari seorang pemikir, bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri tanpa ada keterkaitan dengan lingkungan di mana obyek pemikiran itu ditujukan. Sehingga suatu ide pemikiran biasa muncul dari adanya anomali dari suatu pemikiran, kemudian berusaha untuk memberikan suatu paradigma baru dari pemikiran dan kondisi tersebut. Demikian halnya Jamaluddin Al-Afghani dalam melihat kondisi riil masyarakat dan dunia Islam yang semula mencapai kejayaan, lalu kemudian terjadi suatu stagnasi pemikiran, menyebabkan umat Islam berada dalam trauma kekalahan demi kekalahan. Dunia Islam berada dalam himpitan dan kekuasaan para penjajah dari Barat, yang sebelumnya amat jauh dari apa yang telah digapai oleh umat Islam, bahkan umat Islam menjadi tumpuan dan harapan bagi dunia luar.

Dalam kondisi yang demikian Jamaluddin Al-Afghani berkesimpulan bahwa kemunduran Islam bukanlah karena ajaran Islam sebagaimana yang banyak diduga dan dilontarkan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam, sehingga Islam dianggap tidak sesuai dengan perubahan zaman dan kondisi baru. Karena itu untuk membangun pemerintahan yang bersih dan kuat, yang pertama kali dibangun adalah masyarakatnya. Harus ada perubahan orientasi pemikiran dalam masyarakat, dari keterpakuan serta sikap menerima saja terhadap pemerintahan yang ada menuju upaya perubahan terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam tersebut. Menurut Jamaluddin, seperti dikutip Ahmad Amin, pada hakekatnya kekuatan sebuah masyarakat akan bernilai bila timbul dari dalam diri mereka sendiri. Lembaga perwakilan rakyat bersifat netral dan bisa menentukan bentuk pemerintahan, apakah kerajaan, kesultanan atau pemerintahan yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan asing. Lembaga perwakilan tersebut sangat tergantung pada orang-orang yang akan mengisinya. Oleh sebab itu, pemikiran dan jiwa masyarakat harus terlebih dahulu dibangun dan dibanahi, barulah bisa dibicarakan bagaimana bentuk dan sistem pemerintahan (Mujahidin, 2019).

Untuk usaha ini Jamaluddin menekankan revolusi yang didasarkan pada kekuatan rakyat, sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Dalam pandangannya yang revolusioner ini, Jamaluddin selalu memprovokasi umat Islam di negara di mana ia berkunjung agar menentang kesewenang-wenangan penguasa mereka. Rakyat harus merebut kebebasan dan kemerdekaannya melalui revolusi, yang berarti melalui pemberontakan, kalau perlu dengan pertumpahan darah. Menurut Jamaluddin, kalau ada sejumlah hal yang harus direbut tanpa ditunggu sebagai hadiah, maka kebebasan dan kemerdekaan adalah dua hal diantaranya. Bahkan tidak jarang ia terlibat langsung dalam gerakan politik bawah tanah. Ketika berada di Mesir, ia juga menganjurkan pembentukan pemerintah rakyat melalui partisipasi rakyat dalam pemerintahan konstitusional sejati. Ia menggemakan tentang keharusan pembentukan dewan perwakilan rakyat yang disusun sesuai dengan keinginan rakyat. Anggota-anggotanya harus berasal dari pilihan rakyat, bukan pilihan penguasa atau “pesanan” kekuatan asing. Dari pemikiran Jamaluddin ini, Harun menyimpulkan bahwa Jamaluddin menghendaki bentuk pemerintahan republik

yang di dalamnya terdapat kebebasan rakyat untuk mengeluarkan pendapat dan kewajiban penguasa untuk tunduk pada konstitusi.

Atas dasar tersebut di atas, maka Jamaluddin menekankan perlunya dunia Islam bersatu padu melawan kekuatan asing dalam wadah Pan Islamisme. Jamaluddin menilai bahwa sumber kelemahan dunia Islam adalah lemahnya solidaritas umat Islam. Barat tidak lebih kuat dari umat Islam bila saja mereka mau bersatu menghadapinya. Persatuan dan kesatuan umat Islam sudah lemah sekali. Di antara pemimpin Negara Islam saja kadang-kadang saling menjatuhkan. Di antara Ulama juga sering tidak memiliki komunikasi. Karena itu, umat harus bersatu dalam Pan Islamisme. Untuk mencapai cita-cita ini, Jamaluddin menawarkan langkah-langkah seperti kembali kepada pemahaman keislaman yang benar.

Dari aktivitas dan gagasan politik Jamaluddin, sangat tepat kiranya kalau dikatakan bahwa Jamaluddin adalah orang yang pertama dalam era Islam modern yang menyadari bahaya penetrasi Barat dan perpecahan dunia Islam. Jamaluddin tidak hanya teoretis, tetapi juga berusaha mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam. Gerakan dan gagasan-gagasannya memberi ilham bagi negara-negara Islam untuk bangkit dari keterpurukan mereka karena penjajah Barat dan merebut kembali kemerdekaan mereka.

2. Muhammad Abduh

Murid Al-Afghani yang sangat berpengaruh di Mesir dan dunia Muslim. Abduh (1849–1905) berfokus pada reformasi pendidikan, hukum, dan Menolak taqlid dan menyerukan ijtihad. Ia ingin menghidupkan kembali Islam yang rasional dan progresif.

Gagasan pemikiran politik Muhammad abduh pertama dapat terlihat dalam Arti Tanah Air Muhammad Abduh mengartikan kedudukan tanah air dengan adanya hubungan yang erat dari seseorang warga negara dengan tanah airnya. Ada tiga hal yang mengharuskan seseorang cinta, ghairah dan mempertahankan tanah airnya, yaitu: Sebagai tempat kediaman yang memberikan makanan, perlindungan, dan tempat tinggal keluarga dan sanak saudara, Sebagai tempat memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kedua-duanya menjadi poros (dasar) kehidupan; Tempat mempertalikan diri dimana seseorang akan merasa bangga atau terhina karenanya.¹

Kedua Demokrasi dan Pemerintahan Prinsip demokrasi harus dipegangi bersama baik oleh penguasa maupun rakyat biasa. Sejarah Islam menjadi bukti, betapa kuat demokrasi yang dianut oleh kaum muslimin, pada masa-masa pertama Islam, sebagaimana yang diterapkan oleh khalifah Umar r.a. dan kaumnya, ketika ia berkata dihadapan mereka, “wahai kaum muslimin, barang siapa melihat suatu penyelewengan pada diriku, hendaklah ia meluruskan.” Maka berdirilah seorang dari mereka seraya berkata, “Demi Tuhan, kalau kami dapati pada diri tuan suatu penyelewengan, maka akan kami luruskan dengan pedang kami”. Berkatalah Umar r.a., “Alhamdulillah, Tuhan telah menjadikan diantara kaum muslimin orang yang sanggup meluruskan penyelewengan Umar dengan pedangnya.”

¹ al-Bahi, M. *al-Fikr al-Islâmî al-Hadîts* (hlm. 99).

Menurut Muhammad Abduh, kalau prinsip demokrasi menjadi suatu kewajiban bagi rakyat dan penguasa bersama-sama, maka kewajiban pemerintah terhadap rakyat ialah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dengan bebas dan dengan cara yang benar, agar dapat mewujudkan kebaikan dirinya dan masyarakat. Ketiga Hubungan Undang-undang dengan sosio kultural Orang akan keliru kalau mengira bahwa undang-undang yang adil dan yang sesuai dengan prinsip kemerdekaan ialah undang-undang yang cocok dengan dasar-dasar kebudayaan dan politik yang berlaku di negeri lain, karena tiap-tiap negeri berbeda satu sama lain, disebabkan karena perbedaan geografisnya dan keadaan perdagangan serta pertaniannya. Demikian kedudukannya juga berbeda-beda, baik dalam adat kebiasaan, akhlak, kepercayaan dan sebagainya. Banyak undang-undang yang sesuai untuk satu bangsa, tetapi merugikan bagi yang lain.

Karena itu orang yang membuat undang-undang hendaklah memperhartikan perbedaan-perbedaan di kalangan rakyat, baik tingkatan kecerdasannya maupun keadaan sosialnya, tabiat tanah negerinya, kepercayaan dan kebiasaannya agar pembuat undang-undang tersebut bisa menggariskan kepentingan mereka dan mempertalikan pekerjaan mereka dengan batas-batas yang bisa membawa faidah dan menutup pintu keburukan. Karena itu pula ia tidak boleh meniru Negara lain dalam pembuatan undang-undang.

3. Rasyid Ridha

Nama lengkap seorang Rasyid Ridha ialah Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Muhammad Syams al-Din al-Qalmany. Ia dilahirkan di Desa Qalamun, tidak jauh dari Tripoli, daerah Syria (Syam) pada tanggal 2 H (1865 M). Menurut suatu keterangan, silsilah keturunan atau nasab dari Muhammad Rasyid Ridha masih bersambung kepada cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husein ibn Ali ibn Abi Thalib. Oleh karena itulah, seorang Muhammad Rasyid Ridha memakai gelar al-Sayyid di depan namanya.

Pada dasarnya, pokok-pokok pikiran dan usaha-usaha yang dilakukan Ridha dalam perjuangan umat Islam tidak jauh berbeda dengan pokok-pokok pikiran para tokoh pembaru lainnya, seperti Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh, yaitu bersandar pada segi keagamaan, yaitu tuntutan adanya kemurnian ajaran Islam, baik dari segi akidahnya atau dari segi amaliahnya. Timbulnya ide-ide pembaruan tersebut bermula pada pengalaman yang diperolehnya sewaktu dalam pendidikan, melalui membaca kitab-kitab dan buku-buku serta majalah yang membicarakan tentang keberadaan ajaran agama Islam bagi penganutnya. Salah satu bahan bacaan yang sangat memengaruhinya adalah majalah al-'Urwah al-Wutsqâ yang terbit di Paris di bawah asuhan Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh (1884-1885). Menurut Rasyid Ridha, sistem politik Islam bersifat tauhid, pakta dan khilafah. Prinsip tauhid akan menolak konsep kedaulatan manusia yang sah, baik yang bersifat personal maupun yang lainnya. Menurut Ridha, satu-satunya yang berdaulat hanyalah Allah semata-mata. Risalah merupakan perantara manusia dengan Tuhannya melalui Rasul dan Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum yang abadi. Oleh karena itu, perjanjian tersebut harus menjadi dasar kebijakan Islam.

Rasyid Ridha dalam sebuah bukunya menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan umat, yaitu khilafah, imamah, dan imârah al-mu'minin. Ketiga kata ini mempunyai arti yang sama, yaitu pimpinan pemerintahan umat Islam seluruh masyarakat

untuk menjaga kesejahteraan agama dan urusan dunia. Dari pendapat yang dikemukakan Ridha tadi dapat diambil pengertian khilafah, yakni kepemimpinan menyeluruh dalam persoalan yang berkenaan dengan masalah keagamaan dan duniawi sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW

Rasyid Ridha telah berusaha keras dalam merumuskan ide-idenya bahwa Islam merupakan suatu konsep yang utuh dan lengkap dalam segala sesuatunya. Dalam akhir pembahasannya, Ridha menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa teori klasik tentang kekhalifahan telah menetapkan tolok ukur bagi penyelenggaraan kekhalifahan secara benar. Rasyid Ridha yang pada awalnya memang bukan pemikir politik, pemikiran politiknya berawal dari reaksi terhadap persoalan-persoalan umat Islam yang mengalami kemunduran total dalam segala aspek kehidupan pada waktu itu Masyarakat pada masa itu sedang menghadapi dua permasalahan besar dan inilah yang menjadi faktor yang mempengaruhi pemikiran Rasyid Ridha, yaitu

- Faktor internal, yang berkaitan dengan kemunduran umat Islam dalam segala aspek kehidupan dan para penguasa yang zalim;
- Faktor eksternal, yaitu bangsa-bangsa Barat yang telah mengalami kemajuan di bidang ilmu dan teknologi, sehingga umat Islam ter- desak dan menjadi bangsa yang terjajah oleh bangsa Barat.

Rasyid Ridha mendiagnosis bahwa kerusakan ulama dan ketundukan mereka kepada penguasa sebagai salah satu sebab utama penyimpangan kekhalifahan dari bentuk idealnya di bawah al-Khulafa' al-Rasyidûn menjadi hanya sebagai alat untuk melayani kepentingan rendah para penguasa dan dengan demikian menjadi tirani sebagai bentuk wajar pemerintahan dalam Islam. Pandangan politik Rasyid Ridha sangat tradisional, selain karena pandangan pribadinya, hal ini mungkin juga disebabkan oleh pengetahuannya yang sangat terbatas tentang pemikiran Barat, antara lain karena ia tidak menguasai bahasa-bahasa Eropa, sedangkan karya-karya tulis para pemikir Barat disalin ke dalam bahasa Arab masih relatif jarang. Sebagaimana pembaru lain, ia pun berpandangan bahwa kemunduran umat Islam selain disebabkan oleh kelemahan dan perpecahan politik, juga disebabkan oleh pemahaman dan orientasi teologisnya yang bersifat fatalistik. Karena itu, selain harus menyusun kembali kekuatan dan persatuan politik, umat pun harus mengubah pandangan teologisnya serta berorientasi kepada kemajuan sains dan teknologi sebagaimana berkembang di Barat. Namun demikian, Rasyid Ridha telah mulai merintis pemikiran- pemikiran baru tentang khilafah, yang ternyata banyak memengaruhi pemikir-pemikir Islam selanjutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemikiran politik Islam pada masa kolonialisme dan pasca-kolonialisme merupakan bentuk respons intelektual dan ideologis terhadap krisis multidimensi yang dialami umat Islam akibat dominasi Barat. Runtuhnya institusi kekhalifahan, intervensi politik kolonial, serta kemunduran internal umat menjadi faktor-faktor utama yang mendorong lahirnya gagasan-gagasan pembaruan dalam ranah politik Islam. Tokoh-

tokoh seperti Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha hadir dengan pemikiran yang tidak hanya merefleksikan kondisi zamannya, tetapi juga menawarkan solusi visioner untuk membangkitkan kembali kekuatan umat Islam secara politik dan spiritual. Dengan demikian, pemikiran politik Islam yang berkembang dalam lintasan kolonialisme dan pasca-kolonialisme menunjukkan karakter dinamis, kontekstual, dan transformatif. Ia tidak hanya menjadi bentuk perlawanan terhadap dominasi asing, tetapi juga sebagai upaya rekonstruksi identitas politik Islam yang relevan dan berdaya saing dalam kancah peradaban global.

DAFTAR REFERENSI

- Iqbal, M. (2010). *Pemikiran politik dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer*. Kencana.
- Karim, M. A. (2003). *Sejarah Islam di India*. Bunga Grafies Production.
- Mujahidin, A. (2019). *Negara Islam Modern dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam*. UIN Jakarta.
- Rohim, A. (2017). *Perlawanan Terakhir Diponegoro*. Sociality.
- Soedjono, R. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia: Kemunculan Penjajahan di Indonesia*. Balai Pustaka.